

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**ASAS PUBLISITAS SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM
HAK DEBITUR JAMINAN FIDUSIA BERBASIS KEADILAN SOSIAL**

OLEH :

ANDREW R. SIMANGUNSONG

NIM : 271 413 134

Telah Diperiksa Dan Diuji

Pembimbing I

Pembimbing II



Hj. Mutia Cherawaty Thalib,SH.,MH.
NIP. 19690704 199802 2 001



Dolot Alhasni Bakung,SH.,MH.
NIP. 19850827 200912 1 005

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Novendri M Nggilu,SH.,MH.

NIP. 19891127 201404 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**ASAS PUBLISITAS SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM
HAK DEBITUR JAMINAN FIDUSIA BERBASIS KEADILAN SOSIAL**

OLEH

ANDREW R. SIMANGUNSONG

NIM : 271 413 134

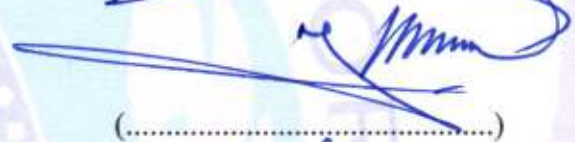
Telah diperiksa dan dipertahankan di depan dewan penguji

Hari / Tanggal : Rabu , 05 Agustus 2020
Waktu Ujian : 09:00 Wita
Tempat : Ruang Ujian Fakultas Hukum

1. **Dr. Fence M Wantu,SH.,MH.**
NIP. 19740119 200112 1 001

(.....)


2. **Suwitno Y Imran,SH.,MH.**
NIP. 19830622 200912 1 004

(.....)


3. **Hj. Mutia Cherawaty Thalib,SH.,MH.**
NIP. 19690704 199802 2 001

(.....)


4. **Dolot Alhasni Bakung,SH.,MH.**
NIP. 19850827 200912 1 005

(.....)


Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum





Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa,SH.,M.Hum.

NIP. 19680409 199303 2 001

ABSTRAK

Andrew R Simangunsong, Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Agustus 2020, Skripsi, Asas Publisitas Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Hak Debitur Jaminan Fidusia Berbasis Keadilan Sosial, Pembimbing I Mutia CH Thalib, SH., MH, dan Pembimbing II Dolot Alhasni Bakung, SH., MH.

Adanya penarikan terhadap objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak kreditur menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur masih sangat rendah. Padahal seharusnya adanya jaminan fidusia seharusnya melindungi debitur dan kreditur sehingga melahirkan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang Bagaimana Asas Publisitas Perlindungan Hukum Hak Debitur Jaminan Fidusia Berbasis Keadilan Sosial serta Sejauhmana Pelaksanaan Eksekusi Berdasarkan UU Nomor 42 Thn 1999 Tentang Fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal dalam menganalisa data yang difokuskan pada pendekatan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa tindakan eksekusi dapat dibenarkan setelah prosedur yang telah ditetapkan oleh UU telah terpenuhi, mulai dari pembuatan akta jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, hingga adanya kepemilikan sertifikat jaminan fidusia. Akan tetapi, tindakan eksekusi berupa penarikan secara paksa obyek jaminan fidusia menjadi ilegal apabila dilakukan tanpa memenuhi prosedur tersebut. Selain itu, kewajiban pendaftaran obyek jaminan fidusia merupakan pengejawantahan dari adanya asas publisitas adalah bentuk perlindungan hukum preventif, sekaligus memberikan transparansi dan kepastian hukum dalam suatu jaminan fidusia. Hal ini kemudian juga dikuatkan oleh MK melalui putusan Nomor 18/PUU-VVIII/2019 yang mewajibkan setiap tindakan eksekusi harus melibatkan pengadilan.

Kata Kunci : Asas Publisitas, Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia, Keadilan Sosial.

ABSTRACT

Andrew Reynaldo Simangunsong, Civil Law, Faculty of Law, State University of Gorontalo, Juli 2020, SKripsi. The Principle of Publicity as Social Justice-based Legal Protection of Debtor's Rights on Fiduciary Guarantee. The principal supervisor is Mutia Cherawaty Thalib, SH., MH, and the co-supervisor is Dolot Alhasni Bakung, SH., MH.

The withdrawal of fiduciary objects done by creditors shows that legal protection on the debtor is still low. In fact, a fiduciary guarantee should protect both creditor and debtor, which creates the justice principle for both parties.

Based on the case, the researcher is interested in studying the principle of publicity as social justice-based legal protection of debtor's rights on the fiduciary guarantee and to what extent the execution is based on Law number 42 of 1999 concerning fiduciary. It is normative research using systematical and grammatical interpretation in analyzing data which focuses on the statue approach.

Findings reveal that the execution is justified after the fulfillment of the procedures regulated by the law, starting from the creation of a fiduciary guarantee deed to the registration of fiduciary guarantee and ownership of a fiduciary guarantee deed. However, the execution, in terms of forced withdrawal on the fiduciary objects, becomes illegal if it is conducted without fulfilling the procedures. Besides, the responsibility of the registration of fiduciary objects, which is an embodiment of the publicity principle, is preventive legal protection. It gives transparency and legal certainty in a fiduciary guarantee as well. It is then supported by Constitutional Court through verdict number 18/PUU-VVIII/2019 that obliges each execution to involve the court.

Keywords: Publicity Principle, Legal Protection, Fiduciary Guarantee, Social Justice

